PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 01 Desember 2018 Halaman: 15

KEUANGAN DAERAH

APBD Jogja Defisit Rp247 Miliar

JOGJA–Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jogja 2019 mengalami defisit hingga Rp247 miliar. Angka itu muncul dalam Rancangan APBD (RAPBD) Jogja 2019 yang sudah disepakati oleh Pemkot dan DPRD Jogja, Jumat (30/11).

Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

- **Rencana belanja daerah Pemkot Jogja tahun depan mencapai Rp1,9 triliun.**
- **Defisit anggaran sebesar Rp247 miliar, rencananya bakal ditutup dengan optimalisasi pendapatan daerah serta anggaran Silpa 2018.**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan dari hasil kesepakatan RAPBD Jogja 2019, total perencanaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun depan sebesar Rp1,7 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,9 triliun.

Adapun soal defisit, kata Kadri, rencananya bakal ditutup dengan optimalisasi pendapatan daerah serta sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2018. "Semua sudah kami petakan bersama Dewan. Setelah persetujuan bersama, akan kami sampaikan ke DIY untuk dievaluasi," kata Kadri, Jumat (30/11).

Sesuai ketentuan, RAPBD tahun depan harus sudah disepakati paling lambat satu bulan sebelum masa tahun anggaran berakhir atau maksimal 30 November pukul 24.00 WIB. Jika melebihi batas waktu, maka kepala daerah serta anggota dewan terancam tidak mendapatkan gaji selama enam bulan. "Komposisi RAPBD 2019 tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun ini," katanya.

Akan tetapi, kata Kadri, ada beberapa pos dana transfer dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil pajak yang turun atau berkurang. Namun untuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) diakui Kadri justru meningkat.

"Ini karena ada kenaikan gaji PNS sebesar lima persen serta kucuran dana kelurahan. Kalau secara keseluruhan, dana dari Pusat yang dikucurkan ke daerah naik Rp280 juta kelimbang tahun 2018," katanya.

Selain itu, Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan apresiasi atas kinerja pemerintah di daerah, menurut Kadri juga turun. Pasalnya Pemerintah Pusat menilai kinerja Pemkot yang dinilai baik hanya bidang pendidikan dan perekonomian daerah. "Untuk sektor lain masih dianggap stagnan. Informasinya, DID yang akan diterima Pemkot sekitar Rp37 miliar, padahal tahun 2018 memperoleh Rp42 miliar," katanya.

Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko mengelak jika penetapan RAPBD 2019 hanya untuk mengejar batas waktu pengesahannya. Menurut dia, sejak awal pembahasan RAPBD 2019, kesepakatan atau persetujuan bersama tersebut ditetapkan pada 30 November 2018.

"Tidak ada yang menghambat proses pembahasan. Semua agenda harus disesuaikan waktunya. Yang penting tidak ada tahapan yang dilanggar sehingga semua masih dalam batas wajar," kata dia.

Terkait dengan fokus belanja daerah, Sujanarko mengakui hal itu disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mulai dari upaya pengentasan kemiskinan, bidang pendidikan serta pembangunan infrastruktur.

Dia memastikan komposisi RAPBD 2019 lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan terbebas dari kepentingan politik menjelang Pemilu 2019.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005